

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keamanan Manusia (*Human Security*)

Munculnya wacana keamanan manusia adalah produk dari konvergensi faktor-faktor di akhir Perang dingin. Ini menantang dominasi fokus paradigma neo-realis pada negara dan keamanan militer, sehingga memunculkan konsep keamanan yang lebih luas. Laju globalisasi yang semakin cepat; kegagalan pembangunan negara liberal melalui instrumen Konsensus Washington; berkurangnya ancaman perang nuklir antara negara adidaya, kenaikan eksponensial dalam penyebaran dan konsolidasi demokratisasi dan norma-norma hak asasi manusia internasional membuka ruang dimana konsep pembangunan dan keamanan dipertimbangkan kembali (Ikenberry dkk., 2006)

Pada saat yang sama meningkatnya jumlah konflik kekerasan internal di Afrika, Asia dan Eropa menghasilkan konsep keamanan nasional dan internasional gagal mencerminkan tantangan lingkungan keamanan pasca Perang Dingin sementara kegagalan model pengembangan neo-liberal untuk menghasilkan pertumbuhan, terutama di Afrika, atau untuk menangani konsekuensi dari ancaman baru yang kompleks (seperti HIV dan perubahan iklim) memperkuat argumen bahwa lembaga dan negara internasional tidak terorganisir untuk mengatasi masalah tersebut secara terintegrasi (Ikenberry dkk., 2006).

Indikator utama adanya konsepsi keamanan individual (manusia) adalah pertimbangan masyarakat internasional tentang hak-hak individu dalam menghadapi potensi ancaman dari negara. Fokus analisis yang paling jelas adalah yang tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB (1948) dan perjanjian-perjanjian serta konvensi yang terkait dengan kejahatan tertentu (misalnya: genosida) dan hak-hak

kelompok tertentu (misalnya: masyarakat adat, perempuan, kelompok rasial, dan pengungsi) (Ikenberry dkk., 2006)

Adapun fungsi dari keamanan manusia sesuai dengan argumen PBB adalah; (The Human Security Unit, 2021); *Dari koordinasi hingga integrasi*. Penerapan keamanan manusia memajukan respons komprehensif yang mengatasi penyebab multidimensi dan konsekuensi dari tantangan yang kompleks. Dengan demikian, pihaknya menyerukan tindakan terpadu di antara jaringan pemangku kepentingan untuk memastikan respons yang paling sulit terhadap defisit yang paling sulit dalam perdamaian dan pembangunan; *Mempromosikan kemitraan multi-pemangku kepentingan*. Keamanan manusia menyatukan keahlian dan sumber daya berbagai aktor dari sistem PBB, Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan untuk merebut sinergi yang memanfaatkan keunggulan komparatif dari berbagai pemangku kepentingan; *Lokalisasi dan 'tidak meninggalkan siapa pun'*. Menyadari bahwa akar penyebab dan manifestasi tantangan bervariasi secara signifikan di seluruh negara dan komunitas, keamanan manusia mempromosikan tanggapan yang beralasan dalam realitas lokal. Ini membantu melokalkan agenda internasional dan nasional untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal; *Pencegahan dan ketahanan*. Pencegahan adalah tujuan inti keamanan manusia. Ini membahas akar penyebab kerentanan, memfokuskan perhatian pada risiko yang muncul dan menekankan tindakan dini. Ini memperkuat kapasitas lokal untuk membangun ketahanan, dan mempromosikan solusi yang meningkatkan kohesi sosial dan memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat.

Keamanan manusia adalah paradigma yang muncul untuk memahami kerentanan yang mana pendukung gagasan ini pada dasarnya menantang gagasan tradisional mengenai keamanan nasional yang mengedepankan atau melalui keamanan militer. Dimana konsep ini dengan tegas merujuk bahwa keamanan harus berada di tingkat manusia daripada

nasional. Keamanan manusia mengungkapkan pemahaman keamanan yang berpusat pada orang dan multidisipliner yang melibatkan sejumlah bidang penelitian, termasuk studi pengembangan, hubungan internasional, studi strategis, dan hak asasi manusia.

2.1.2 Teori Kebutuhan Dasar Manusia (*Human Needs Theory*)

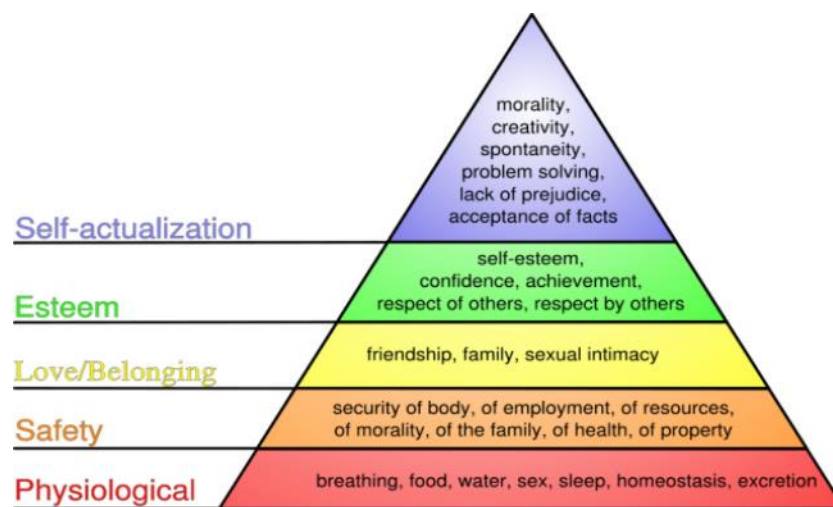
Manusia melakukan usaha-usaha memenuhi kebutuhan hidup demi keberlangsungan hidupnya. Dalam rangka pemenuhan ini manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karenanya ia disebut sebagai makhluk sosial. Teorisasi kebutuhan dasar manusia telah di analisa oleh berbagai ilmuwan seperti Abraham Maslow, John Burton, Marshall Rosenberg, Max Neef, David McClelland's, dan lain sebagainya.

Maslow mendasari teori kebutuhannya dengan motivasi yang sifatnya universal dan kemudian mengenalkan kebutuhan dasar manusia sebagai lima tingkatan dalam bentuk piramida. Maslow memulai kebutuhan dasar manusia dari terendah hingga tertinggi dan apabila kebutuhan yang paling dasar terpenuhi, maka manusia akan memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Masing-masing level pada piramida kebutuhan Maslow saling terkait satu dan lainnya. Sebagai contoh pada level kebutuhan keamanan (*safety needs*) sangat berkaitan erat dengan level kebutuhan fisiologis (*physiological needs*). Kebutuhan keamanan akan datang setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi dimana manusia memiliki pekerjaan cenderung memiliki ketakutan kehilangan kesehatan, keamanan diri, pekerjaan, harta benda, dan bencana lainnya yang berpotensi mengganggu kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, seks, tempat tinggal tetap, dan sebagainya (Ondabu, 2014).

Sedangkan kebutuhan sosial atau *social needs* dimana tiap individu membutuhkan perasaan dimiliki dan diterima dalam suatu kelompok dalam kategori sosial. Atau dengan kata lain manusia/ individu pada dasarnya tidak suka dengan perasaan diskriminasi yang dilakukan oleh manusia atau

kelompok (keluarga, teman dekat, hingga masyarakat) kepada dirinya (Ondabu, 2014).

Kebutuhan penghargaan atau *esteem needs* cenderung ada setelah-kebutuhan-kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Kebutuhan untuk merasa dihargai bukan hanya didapatkan dari orang lain namun juga dari pribadinya sendiri. Terakhir menurut Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri atau *self actualization* yang merupakan kebutuhan yang paling tinggi di hierarki kebutuhan (Ondabu, 2014).



Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan Maslow

Sumber: Ibrahim Tirimba (2014)

John Burton, tidak berbeda jauh dengan Maslow, mengidentifikasi seperangkat kebutuhan dasar manusia yang dianggap universal namun tanpa hirarki. Burton mengembangkan teori kebutuhan dasar manusia meliputi keadilan yang merata atau *distributive justice*; juga memerlukan kebutuhan akan rasa aman atau *safety-security*; manusia juga membutuhkan rasa dimiliki atau *belongingness*; penghargaan diri atau *self esteem* juga kebutuhan dasar manusia; pemenuhan personal atau personal *fulfillment*; memiliki identitas atau *identity* juga merupakan kebutuhan manusia; keamanan budaya yang dimiliki atau *cultural security* juga merupakan kebutuhan dasar; manusia juga membutuhkan kebebasan atau *freedom*; dan terakhir adalah kebutuhan untuk berpartisipasi atau *participation*. Secara garis besar Maslow dan Burton menekankan

kebutuhan dasar manusia berdasarkan biologis, psikologis, dan sosial (Danesh, 2012).

2.1.3 Teori Peran (*Role Theory*)

Secara garis besar, teori peran merupakan teori yang erat kaitannya dengan sudut pandang keilmuan sosiologi dan psikologi sosial. Dimana menganggap bahwa aktivitas harian diperankan oleh kategori yang ditetapkan secara sosial. Setiap peran sosial merupakan rangkaian hak, kewajiban norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Sehingga teori peran ini percaya bahwa tiap orang melakukan suatu tindakan berdasarkan konteks dan posisi sosial serta faktor-faktor lain, sehingga perilakunya dapat diprediksi.

Teori peran berasal dari sosiolog Amerika Robert Merton yang berdasar pada posisi sosial yang dimiliki orang (misalnya, guru, ibu, dan pelanggan) dan perilaku yang terkait dengan posisi itu. Suatu peran cenderung membawa risiko dan manfaat tertentu yang dapat bervariasi menurut karakteristik individu, waktu, sejarah/ historis, dan konteks budaya. Peran dapat memberikan koneksi ke orang lain dan akses ke sumber daya, yang dapat memberikan perasaan aman, peningkatan status, dan kepuasan ego. Peran juga memberikan arah, untuk menunjukkan perilaku atau sikap dalam situasi yang tidak pasti sehingga dapat berfungsi untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan kesejahteraan. Orang sering memenuhi serangkaian peran pada saat yang sama dan set ini dapat berubah selama perjalanan hidup, misal seorang ibu juga seorang direktur, juga seorang anak juga seorang istri. Seiring dengan penuaan, Indonesia-seimbangan terjadi antara peran-peran yang dimiliki dan cenderung akan hilang (Artsen dan Hansen, 2020)

Teori Peran juga mengacu pada norma-norma budaya mengenai aspek psikologis dan interaksional anggota masyarakat. Salah satu aspek dari teori peran adalah mempelajari bagaimana peran dipelajari selama proses interaksi sosial. Artinya, orang berinteraksi dengan orang lain,

mereka melihat diri mereka dan orang lain sebagai 'penghuni' status atau tingkatan sosial tertentu, dan mereka belajar (menjadikan itu panduan) untuk bertindak. Sehingga ada aturan atau skrip atau pedoman sosial tertentu yang terkait dengan peran tertentu (Georgas, 2004).

2.1.4 Teori Ketahanan Sosial (*Social Resilience*)

Kemampuan suatu kelompok atau komunitas dalam mengatasi dampak dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik merupakan ketahanan sosial. Sama halnya dengan ketahanan pangan, ekonomi, dan ketahanan nasional, ketahanan sosial juga diperlukan untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan partisipasi, pengendalian konflik, kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial, serta perlindungan sosial itu sendiri, yang mana keempatnya menjadi indikator ketahanan sosial masyarakat. Ketahanan sosial ini dapat tercapai hanya jika kondisi dalam komunitas atau kelompok (masyarakat) tersebut dapat memenuhi kebutuhan anggotanya (Bahransyaf & Probosiwi, 2013, p. 226).

Diskusi Pakar tahun 2002 tentang *Membangun Konsepsi dan Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat* mendapatkan hasil bahwa ketahanan sosial dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu *perspektif luas* yang artinya ketahanan sosial adalah bagian integral dari ketahanan nasional bersama dengan ketahanan ekonomi, politik, budaya, dan pertahanan-keamanan. Selain itu dari *perspektif sempit* yang artinya ketahanan sosial dipandang sebagai kemampuan komunitas dalam mengatasi Indonesia akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik (Padmiati, 2013, p. 266).

Sedangkan Marck Keck dan Sakadapolrak dalam tulisannya yang mengacu pada argumen oBrist dkk yang mendefinisikan ketahanan sosial sebagai kapasitas seseorang untuk mengakses modal yang ada untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi yang berhubungan dengan ancaman. Kapasitas yang dimaksud bukan hanya untuk mengatasi dan menyesuaikan dengan kondisi (modal) yang merugikan atau tidak baik (kapasitas reaktif) namun juga mencari dan membuat opsi lain (kapasitas

proaktif). Oleh karena itu oBrist kemudian mengajukan pertanyaan lain tentang ketahanan sosial, apa yang dapat meningkatkan kapasitas individu, kelompok, dan organisasi untuk menangani ancaman dengan lebih kompeten (Keck & Sakdapolrak, 2013).

Dari pertanyaan tersebut oleh Keck dan Sakadapolrak dengan mengumpulkan argumen dari Martin Voss, Daniel Lorenz, Christophe Béné dkk, dan Marck oBrist dkk, “memberikan” tiga jenis kapasitas yang diperlukan untuk memahami gagasan ketahanan sosial dalam makna sepenuhnya. Pertama *coping capacities* atau kapasitas coping yang merujuk pada reaktif dan absorptif yaitu ukuran bagaimana orang mengatasi dan mengatasi ancaman langsung dengan modal sumber daya yang tersedia secara langsung; Kedua adalah *adaptive capacities* atau kapasitas adaptif yang mengacu pada proaktif dan preventif, belajar dari pengalaman masa lalu, mengantisipasi risiko masa depan dan menyesuaikan modal; Ketiga adalah *transformative capacities* atau kapasitas transformatif atau kapasitas partisipatif dalam yang mencakup kemampuan untuk mengakses modal dan bantuan dari arena sosio-politik yang lebih luas (misal organisasi pemerintah), untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan untuk membuat institusi yang keduanya meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan ketahanan mereka dari krisis di masa depan (Keck & Sakdapolrak, 2013).

Tab. 1: Three capacities of social resilience

	Coping capacities	Adaptive capacities	Transformative capacities
Response to risk	ex-post	ex-ante	ex-ante
Temporal scope	short-term	long-term	long-term
Degree of change	low, status quo	medium, incremental change	high, radical change
Outcome	restoration of present level of well-being	security of future well-being	enhancement of present and future well-being

Source: Own draft based on VOSS (2008), LORENZ (2010), OBRIST et al. (2010a), BÉNÉ et al. (2012), KECK (2012)

Gambar 2.2 Tiga Kapasitas Ketahanan Sosial

Sumber: Keck & Sakdapolrak (2013)

Rochman Achwan dalam tulisannya, *Ketahanan Sosial Komuniti di Indonesia: Beberapa Catatan Empiris* juga menjelaskan bahwa konsep

ketahanan sosial ini berkaitan erat dengan modal sosial (*social capital*) yang mana terdiri dari aspek organisasi sosial, seperti norma, jaringan sosial, dan kepercayaan sosial yang mendorong tindakan kolektif untuk mencapai tujuan dan manfaat bersama. Menurut Achwan bentuk nyata dari modal sosial ini adalah kelompok sosial yang dibentuk sendiri oleh anggota komunitas atau masyarakat (Achwan, 2002).

Argumen ini juga dielaborasi oleh Makmur Sunusi dimana ia mendefinisikan modal sosial ini sebagai norma dan hubungan sosial yang menyatu dalam struktur masyarakat sehingga dapat membuat orang bekerja sama (*connected-ness*) untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Narayan dan Woolcock mendefinisikan lebih sederhana dengan meyakini bahwa norma-norma dan jaringan-jaringan kerja yang membuat orang mau bertindak secara kolektif (Nuryana, 2002).

Berbagai studi ahli menjelaskan bahwa modal sosial memberikan kontribusi penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terdiri dari unsur-unsur kepercayaan (*trust*), jaringan (*networking*), nilai (*value*), dan komitmen. Unsur-unsur ini yang memiliki arti dan fungsi strategis untuk mewujudkan tatanan sosial yang teratur dan harmonis (Bahri, et.al., 2002, p. 8). Pada akhirnya derajat ketahanan sosial ditentukan oleh tinggi rendahnya stok modal sosial serta keberfungsian modal sosial tersebut sehingga penting untuk memfasilitasi lembaga atau komunitas yang ada (Padmiati, 2013, p. 265).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan. Penelitian terdahulu ini akan membantu penelitian yang dilakukan terutama dalam proses analisa. Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, dan untuk memudahkan melihat kesamaan dan perbedaan dalam materinya, penulis menyajikannya dalam bentuk tabel pada bagian akhir penjelasan.

2.2.1 *Indigenous Perspectives of Resilience: Strength and Adaptive Strategies* oleh Monica Yadeun-Antuñano dan Leticia Canal Vieira

Hasil dari penelitian ini ada delapan pembahasan penting, pertama adalah *The Foundation of Indigenous Resilience: The Interconnection with the Land* dimana bagian ini menjelaskan bahwa ada interkoneksi antara tanah ditinggali selama puluhan tahun bahkan ratusan dengan masyarakat-(adat)-nya. Kedua *Place-Based, Spiritual-Based, and Collective-Based Resilience* yang mana untuk memahami masyarakat adat utamanya interpretasi ketahanan masyarakat adat muncul dari gagasan keterkaitan antara manusia itu sendiri (masyarakat adat), tanah, dan spiritualnya. Poin yang paling banyak dibahas tentang perspektif ketahanan masyarakat adat adalah tempat, spiritual, dan ketahanan kolektif. Ketiga, *Maintaining Indigenous Resilience: Owning and Taking Care of the Land* dimana dijelaskan bahwa ketahanan masyarakat adat bisa tercapai dengan memiliki dan mengolah tanah mereka bersama. Empat, *Breaking Indigenous Resilience: Loss and Degradation of the Land* yang artinya kehilangan tanah adalah kehilangan dasar spiritual mereka yang merupakan fondasi dalam membangun ketahanan. Lima adalah *Regaining Resilience from the Inside: An Example* dimana penulis mengambil contoh suku Kikuyu, Kenya yang mengalami degradasi lingkungan karena deforestasi untuk pengembangan Kenya. Kerusakan ini membuat masyarakat adat Kikuyu kesulitan akses air bersih, kayu sebagai bahan bakar sehingga mengancam keberlangsungan hidup mereka. Kemudian dengan prinsip hidup Kikuyu *serudj-ta* (perbaikan, memperbaiki, dan memulihkan dunia), mereka memulai gerakan untuk menanam pohon berdasarkan pengetahuan asli Kikuyu, menyelenggarakan lokakarya untuk melatih wanita tentang mengelola pembibitan pohon

dan menanam pohon. Hasilnya, tidak hanya mengembalikan kesehatan ekosistem namun juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kikuyu (Yadeun-Antuñano & Vieira, 2018).

Kemudian penulis mengajukan *Ways to Promote Indigenous Resilience* yang dapat dilakukan yaitu; memberikan akses kepada tanah dan wilayah hidup mereka; melindungi alam; memberikan praktik kesehatan atau akses kesehatan yang mengizinkan masuknya nilai-nilai budaya masyarakat adat; pendidikan yang merevitalisasi bahasa, budaya, dan tradisi yang telah dimiliki oleh masyarakat adat; dan terakhir adalah pengakuan terhadap kontribusi masyarakat adat kepada orang-orang Barat (negara maju) (Yadeun-Antuñano & Vieira, 2018).

Dimana pada poin selanjutnya penelitian ini, mengatakan bahwa studi mengenai ketahanan masyarakat adat telah banyak dilakukan sehingga masyarakat adat sangat potensial mendapatkan tempat dalam dunia global. Jika diiringi dengan adaptasi-adaptasi strategis, bukan hanya dari masyarakat adat, namun juga dunia Barat. Terakhir adalah *Indigenous Peoples and Agenda 2030: Sustainable Development Goals* yang merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/ UN) yang melibatkan masyarakat adat sebagai aktor yang diharapkan memberikan kontribusi besar dalam membentuk masa depan masyarakat (global) menuju pembangunan berkelanjutan (Yadeun-Antuñano & Vieira, 2018).

2.2.2 *Developing Transnational Indigenous Solidarity: The Case of Borneo Dayak Forum* oleh Yuve Kukuh Sesar, Reza Triarda, dan Juliansyah Rahmat Maulana

Penelitian ini fokus kepada bagaimana peran institusi kemasyarakatan-adat-memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat adat itu sendiri dengan mengambil contoh masyarakat

adat Dayak, Indonesia. *Borneo Dayak Forum* (BDF) berfungsi sebagai platform yang dimanfaatkan masyarakat Dayak untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan Indonesia. BDF memiliki peran penting dalam mempromosikan agenda orang-orang Dayak dalam mencapai kehidupan yang berkelanjutan, terutama dalam melestarikan hukum adat dan melindungi tanah adat. BDF sudah secara rutin menyebarluaskan informasi tentang masyarakat adat Dayak di tingkat internasional dengan melakukan kunjungan-kunjungan yang dilakukan untuk menilai situasi dan kondisi yang terjadi serta mencari dukungan untuk memperluas jaringan dan menyebarluaskan informasi tentang komunitas Dayak (Sesar et al., 2021).

Selain itu juga ada penggunaan lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) yang sama efektifnya dalam mengkomunikasikan informasi di sektor domestik. Kepercayaan masyarakat adat terhadap DAD memudahkan BDF untuk mengumpulkan data dan menentukan target advokasi yang harus dilakukan. Hubungan yang terjalin antara DAD dan yang lain di setiap provinsi membuat informasi tentang kondisi masyarakat Dayak di seluruh Indonesia lebih mudah diketahui. Aliran informasi yang cepat dari tingkat domestik juga memungkinkan BDF untuk memiliki informasi yang lebih aktual dalam proses advokasi di tingkat internasional. Namun sayangnya peran media belum digunakan dengan maksimal oleh BDF dalam proses advokasinya. Ini dikarenakan adanya penilaian yang berbeda dari masyarakat dan pemerintah Indonesia. Hal ini tidak menahan BDF untuk tetap menyebarluaskan informasi dengan melibatkan anggota mereka dalam posisi strategis di pemerintah, seperti yang dilakukan di Malaysia, musisi, dan media sosial seperti Facebook. BDF juga menggunakan momentum dengan baik seperti aktivitas Tumbang Anoi, yang dianggap bertepatan dengan hari Peringatan Kebebasan. BDF juga menggunakan simbol-simbol seperti Salam

Dayak dan warna merah untuk mencirikan dalam menyuarakan advokasi mereka untuk komunitas masyarakat adat Dayak. Bukan hanya itu, proses advokasi ini juga melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjadi penguatan jaringan yang sangat dibutuhkan. Keberadaan BDF di institusi internasional akan memungkinkan BDF untuk memberikan dorongan pada pemerintah Indonesia untuk mengubah kebijakannya melalui PBB. Namun pada akhirnya BDF belum sampai pada tahapan “mendesak dengan segera” pemerintah Indonesia karena belum meratifikasi nilai-nilai global yang disepakati melalui konvensi ILO 169 tentang masyarakat adat (Sesar et al., 2021).

2.2.3 REWANG: Kearifan Lokal dalam Membangun Solidaritas dan Integrasi Sosial Masyarakat di Desa Bukit Batu Kabupaten Bengkalis oleh Hasbullah

Penelitian ini fokus kepada analisa tentang satu budaya yaitu Rewang yang tidak hanya mampu mengatur perilaku sosial anggotanya, tetapi juga mempunyai nilai yang praktis dan ekonomis. Melalui tradisi Rewang masyarakat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat, serta sangat ekonomis. Hal ini karena adanya sumbangan dan kerelaan dari anggota masyarakat dalam membantu keluarga yang melangsungkan acara perkawinan. Di samping itu, Rewang juga menciptakan ikatan moril yang lebih erat, baik antar keluarga, maupun antar individu dalam masyarakat (Hasbullah, 2012).

Tradisi Rewang juga melewati lintas batas etnis, stratifikasi sosial dan status sosial yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian, tradisi ini sifatnya egaliter dan kosmopolit. Tidak ada kesan siapa yang dieksploitasi dan siapa yang mengeksploitasi, yang ada hanya upaya pencapaian tujuan bersama (Hasbullah, 2012).

Nilai-nilai solidaritas sosial sangat nyata terkandung dalam tradisi Rewang ini, dimana masyarakat merasakan senasib sepenanggungan sehingga mereka harus saling membantu dan bahu membahu dalam menyelesaikan pekerjaan (Hasbullah, 2012).

Masing-masing warga masyarakat membantu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Warga masyarakat Bukit Batu dalam melaksanakan tradisi ini juga tidak membedakan antara warga masyarakat yang telah lama tinggal (penduduk tempatan) dengan warga pendatang (warga baru). Mereka diperlakukan sama, dengan catatan tentu saja mereka harus menunjukkan sikap sosial-kemasyarakatannya (Hasbullah, 2012).

2.2.4 *Global Mapping of Indigenous Resilience Facing the Challenge of the COVID-19 Pandemic* oleh Diosey Ramon Lugo-Morin

Penelitian yang dilakukan di wilayah Huehuetla, terletak di utara Puebla, Mexico pada tahun 2017-2018 dimana hasilnya institusi informal memainkan peran penting dalam sistem pangan masyarakat adat Totonac. Hal ini ditunjang oleh kekayaan budaya kelompok adat Totonac yang diekspresikan dalam sistem kepercayaannya, nilai-nilai, dan tradisi. Kampanye dan konservasi strategi agro-produktif dilakukan melalui tarian, festival keagamaan, dan ritual. Cara-cara ini bisa menjadi jalan untuk transformasi “wilayah” dan gerakan, dari wilayah yang terpinggirkan termarginalkah, dengan atribut cenderung negatif menjadi suatu budaya dengan potensi untuk mengembangkan sistem pangan regional (Lugo-Morin, 2021).

Banyaknya institusi informal dalam kelompok adat Totonac memungkinkan untuk menegaskan bahwa ada ketahanan kelembagaan yang kuat dari kelompok adat dan merupakan elemen yang menentukan dalam pembangunan wilayah kota Huehuetla. Memulihkan pengetahuan “tradisional” dapat membuat perbedaan

dalam menggambar proses pengembangan masyarakat. Penting untuk memperkuat wilayah dengan kekayaan budaya melalui desain dan implementasi kebijakan publik yang memungkinkan masyarakat adat untuk maju, mendapatkan pengakuan bahwa wilayah ini dapat menunjukkan sistem ketahanan pangan (Lugo-Morin, 2021).

Penelitian juga menunjukkan sistem interelasi yang tidak ada sebelumnya tetapi dengan terjadinya pandemi Covid-19, sistem ini muncul. Munculnya krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 memunculkan kesadaran terhadap pentingnya sistem pangan “asli”, sistem yang dirancang ribuan tahun lalu yang tidak hanya untuk mengatur pangan masyarakat dalam kondisi umum tetapi juga untuk menanggapi tantangan dalam kondisi tertentu seperti perang, penyakit/ pandemi, perubahan iklim, dan sebagainya. Bahkan berdasarkan tinjauan literatur lintas benua (Afrika, Asia, Eropa, Amerika Latin/ Amerika Utara dan Oseania) menunjukkan bahwa sejumlah besar masyarakat adat telah mendasarkan strategi koping mereka pada sistem pangan untuk bertahan di kondisi Covid-19 (Lugo-Morin, 2021).

Oleh karena itu memperkuat ketahanan institusional harus diarahkan untuk melindungi sistem keyakinan, nilai-nilai dan tradisi masyarakat adat. Mengintegrasikan pendekatan ketahanan institusional dengan belajar dari pengalaman lembaga-lembaga informal kelompok-kelompok adat dunia melalui desain kebijakan publik, perlu dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan kehidupan dan kesehatan manusia dalam menghadapi pandemi Covid-19 (Lugo-Morin, 2021).

2.2.5 Desa Adat Menjadi Benteng Terakhir dalam Memutus Penyebaran Covid-19 Studi pada Desa Adat Tegallalang Gianyar Bali oleh I Wayan Eka Artajaya dan I Wayan Wiasta

Sebagai wilayah yang mengunggulkan sektor pariwisata bertaraf internasional tentunya berdampak pada Pulau Bali yang mana saat ini mengalami kelumpuhan. Selain pemerintah melakukan pencegahan dengan berbagai cara, salah satunya Pemerintah daerah Provinsi Bali memberikan kewenangan kepada desa adat Tegallalang membentuk ketentuan dalam rangka untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Desa Adat Tegallalang membuat suatu perarem dengan melakukan penjagaan yang sangat ketat pada pintu masuk desa adat. Penjagaan terhadap masyarakat keluar masuk desa Tegallalang diperketat dan dilakukan pengecekan terkait Covid-19, pendataan terhadap rumah *kost-kostan*, dimana penghuni *kost* diperkenankan untuk pulang ke asalnya, tetapi tidak diizinkan untuk kembali ke desa sebelum situasi kembali normal. Ketentuan tersebut terbukti efektif karena sampai dengan penelitian dilakukan (Juni 2020) tidak ada warga desa adat yang terdampak Covid-19. Bahkan lebih dari itu, desa adat ini telah menjadi benteng terhadap budaya asing, mereka mempertahankan tradisi, kebudayaan yang sarat akan nilai luhur magis dan religius agar tercapainya konsep *Tri Hita Karana* (Artajaya & Wiasta, 2020).

2.2.6 Ketahanan Pangan Berbasis Adat (tantangan Penanganan Covid-19 di Bali) oleh Komang Suarsana

Penelitian ini berfokus pada bagaimana ketahanan pangan yang ada di Bali pada saat dan pasca pandemi. Dari penelitian didapatkan bahwa peran desa adat sangat penting dalam menyangga ketahanan pangan. Pemerintah Provinsi Bali, Majelis Dewan Adat (MDA), dan Satgas sendiri memang belum bisa

menangani masalah kebutuhan pangan juga dengan fluktuasi harga pangan di Bali. Namun bukan berarti tidak ada langkah yang dilakukan untuk menangani hal ini karena jika tidak akan menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dilakukan melalui strategi jangka pendek (dan panjang) dengan memanfaatkan sistem bertahan masyarakat desa adat (Suarsana, 2020).

Pada akhirnya ketahanan pangan di Bali dapat tercapai bukan hanya dengan adanya Tim Lumbung Pangan namun pilar utamanya adalah *subak*. *Subak* sendiri merupakan masyarakat hukum adat yang bersifat sosio-agraris-religius dan berkembang menjadi organisasi pengusaha tanah dalam suatu daerah. Pada masa pandemi ini, *Subak* kemudian berfungsi sebagai pendukung ketahanan pangan, baik di tingkat keluarga atau rumah tangga serta daerah (Suarsana, 2020).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Indigenous Perspectives of Resilience: Strength and Adaptive Strategies</i> oleh Monica Yadeun-Antuñano dan Leticia Canal Vieira	Terdapat keterikatan fisik, emosional, dan spiritual antara masyarakat adat dengan tanah yang mereka tinggali. Dan cara untuk mempromosikan ketahanan masyarakat adat <i>access to land and territories; the protection of nature; medical practices that allow for</i>	Menjelaskan perspektif ketahanan dan “syarat” terjadinya ketahanan dari sisi masyarakat adat, juga bagaimana beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan global.	Lokus penelitian.

		<i>indigenous cultural values; education that revitalizes indigenous language, culture, and traditions; dan recognition of indigenous people contributions to Western people.</i>		
2	<i>Developing Transnational Indigenous Solidarity: The Case of Borneo Dayak Forum</i> oleh Yuve Kukuh Sesar, Reza Triarda, dan Juliansyah Rahmat Maulana	<i>Borneo Dayak Forum (BDF) dan Dewan Adat Dayak (DAD) berfungsi sebagai platform yang dimanfaatkan masyarakat Dayak untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan Indonesia. BDF memiliki peran penting dalam mempromosikan agenda orang-orang Dayak di tingkat domestik dan internasional, dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan, terutama dalam melestarikan hukum adat dan melindungi tanah adat. Proses advokasi melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai penguatan jaringan</i>	Upaya masyarakat adat untuk mengadvokasi hak budaya mereka.	Lokus penelitian.

		<p>yang dibutuhkan. Namun sayangnya peran media belum maksimal dalam proses advokasinya kepentingan orang Dayak.</p> <p>Pada akhirnya BDF belum sampai pada tahapan “mendesak dengan segera” pemerintah Indonesia karena belum meratifikasi nilai-nilai global yang disepakati melalui konvensi ILO 169 tentang masyarakat adat.</p>		
3	<p>REWANG: Kearifan Lokal dalam Membangun Solidaritas dan Integrasi Sosial Masyarakat di Desa Bukit Batu Kabupaten Bengkalis oleh Hasbullah</p>	<p>Budaya Rewang tidak hanya mampu mengatur perilaku sosial anggotanya, tetapi juga mempunyai nilai yang praktis dan ekonomis. Di samping itu, Rewang juga menciptakan ikatan moril yang lebih erat, baik antar keluarga, maupun antar individu dalam masyarakat.</p> <p>Tradisi Rewang melewati lintas batas etnis, stratifikasi sosial dan status sosial yang ada di</p>	<p>Kearifan lokal tertentu dalam membangun ketahanan sosial di kelompok masyarakat.</p>	<p>Lokus penelitian dan situasi yang dihadapi (panemi)</p>

		<p>tengah masyarakat. Nilai-nilai solidaritas sosial sangat nyata dalam tradisi Rewang dimana masyarakat merasakan senasib sepenanggungan sehingga mereka saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tidak ada perbedaan antara penduduk tempatan dengan pendatang, dengan catatan harus menunjukkan sikap sosial-kemasyarakatannya.</p>		
4	<p><i>Global Mapping of Indigenous Resilience Facing the Challenge of the COVID-19 Pandemic</i> oleh Diosey Ramon Lugo-Morin</p>	<p>Pembangunan sosial adat berpotensi untuk meningkatkan keberlanjutan kehidupan dunia dan kesehatan manusia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menggunakan pendekatan ketahanan institusional dengan pengalaman lembaga informal masyarakat adat melalui desain</p>	<p>Pembangunan sosial berbasis adat secara global dihadapkan dengan kondisi pandemi</p>	<p>Lokus penelitian.</p>

		<p>kebijakan publik. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kondisi nomotatik dapat bermanfaat bagi wilayah lain di seluruh dunia. Ketahanan institusional adalah langkah menuju menjangkau populasi leluhur dunia untuk belajar dari pengetahuan mereka. Skenario-skenario ini dapat membantu kita memahami implikasi kebijakan internasional tentang kapasitas negara untuk mengamankan akses ke makanan dan sumber daya dan selanjutnya, untuk lebih siap untuk pandemi masa depan.</p>		
5	Desa Adat Menjadi Benteng Terakhir dalam Memutus Penyebaran Covid-19 Study pada Desa Adat	Pemerintah daerah Provinsi Bali memberikan kewenangan kepada desa adat Tegallalang membentuk ketentuan dalam rangka untuk pencegahan	Strategi masyarakat adat dalam membangun ketahanan sosial di masa pandemi	Lokus penelitian

	Tegallalang Gianyar Bali oleh I Wayan Eka Artajaya dan I Wayan Wiasta	penyebaran Covid-19. Adapun peraturan yang dibuat adalah penjagaan terhadap masyarakat keluar masuk desa Tegallalang, pendataan terhadap rumah <i>kost-kostan</i> , dimana penghuni <i>kost</i> diperkenankan untuk pulang ke asalnya, tetapi tidak diizinkan untuk kembali ke desa sebelum situasi kembali normal. Ketentuan tersebut terbukti efektif karena sampai dengan penelitian dilakukan (Juni 2020) tidak ada warga desa adat yang terdampak Covid-19.		
6	Ketahanan Pangan Berbasis Adat (tantangan Penanganan Covid-19 di Bali) oleh Komang Suarsa	Peran desa adat sangat penting dalam menyangga ketahanan pangan. Pemerintah Provinsi Bali, Majelis Dewan Adat (MDA), dan Satgas belum bisa menangani masalah kebutuhan pangan juga dengan fluktuasi harga pangan di Bali.	Fungsi dan strategi organisasi/ institusi masyarakat adat dalam membangun ketahanan pangan pada masa pandemi	Lokus penelitian.

		<p>Namun pada akhirnya ketahanan pangan di Bali dapat tercapai bukan hanya dengan adanya Tim Lumbung Pangan namun pilar utamanya adalah Subak yang merupakan masyarakat hukum adat yang berkembang menjadi organisasi pengusaha tanah dan pada masa pandemi berfungsi sebagai pendukung ketahanan pangan, baik di tingkat keluarga atau rumah tangga serta daerah.</p>		
--	--	--	--	--

Sumber: di olah dari berbagai sumber (2021)

2.3 Kerangka Berpikir

Adapun peneliti menyusun kerangka berpikir sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pihak penyelenggara pendidikan sebagaimana berikut di bawah:

Penelitian ini akan menjelaskan secara empiris dan teoritis solidaritas masyarakat adat mampu membangun ketahanan sosial terutama dalam kondisi pandemi (Covid-19). Sehingga nantinya akan dapat dihasilkan pemanfaatan model solidaritas masyarakat adat di berbagai wilayah dalam rangka menghadapi pandemi di masa depan.

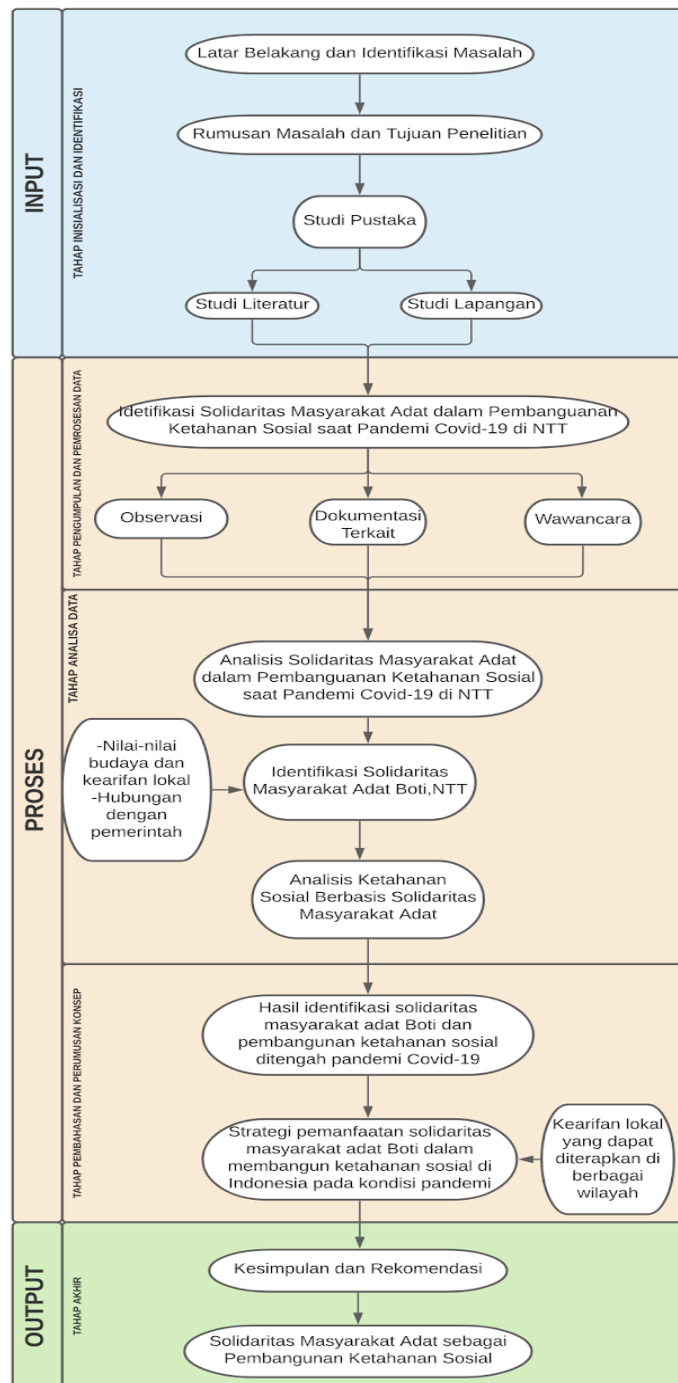
Penelitian ini disusun sesuai dengan kerangka berpikir penulis yang terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu *input*, *proses* dan *output* dan lima

tahapan di dalamnya yang terbagi menjadi tahapan pertama inisialisasi dan identifikasi; kedua tahap pengumpulan dan pemrosesan data; tahap ketiga adalah analisis data; tahap selanjutnya pembahasan; dan terakhir adalah tahap akhir atau hasil penelitian.

Pada tahap pertama inisialisasi dan identifikasi, peneliti melakukan identifikasi masalah. Ini dilakukan dengan melakukan tahap pra penelitian dengan melihat dan mencari latar belakang berdasarkan kondisi yang sedang terjadi dan mengombinasikan dengan studi-studi masa lalu untuk mendapatkan kecocokan dan atau gap penelitian. Sehingga ditemukan kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan dan dapat dirumuskan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Tahap selanjutnya dalam pengumpulan dan pemrosesan data dilakukan pengumpulan data sebanyak-banyaknya mengenai fokus penelitian. Ini dilakukan baik melalui observasi langsung, dengan mengacu pada dokumen-dokumen terkait, dan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten pada isu yang diambil, agar kemudian dapat dilakukan tahap berikutnya yaitu analisa data. Data yang telah didapatkan kemudian dilakukan kondensasi dan juga reduksi untuk mendapatkan data yang benar-benar sesuai dan berkaitan dengan isu utama. Sehingga hasil pada tahap ini dapat dilanjutkan kepada tahap pembahasan dan perumusan konsep dimana akan dianalisa dengan mengombinasikan pada penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan, untuk mendapatkan rumusan atau konsep baru dalam pemanfaatan solidaritas masyarakat adat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari penelitian dan strategi solidaritas masyarakat adat dalam membangun ketahanan sosial di masa pandemi.

Kerangka berpikir tersebut di atas, peneliti sajikan dalam bagan di Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian seperti berikut;



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: di olah peneliti (2021)